



★ P R E M I U M ★

Terbaru Emiten Investasi Bisnis Konglomerasi Historia Rintisan Ragam Signature [English Version](#)

Langkah Cermat Lobi Pelonggaran TKDN Hindari Industri Lokal Jadi Korban Tarif Trump

Langkah Cermat Lobi Pelonggaran TKDN Hindari Industri Lokal Jadi Korban Tarif Trump

Industri dalam negeri khawatir pelonggaran syarat TKDN bisa mengganggu daya saing industri nasional.



To top

Langkah Cermat Lobi Pelonggaran TKDN Hindari Industri Lokal Jadi Korban Tarif Trump

menjadi salah satu tawaran dari Indonesia untuk melobi kebijakan perdagangan terbaru dari AS berpotensi melemahkan industri dalam negeri.

Pemerintah berencana menawarkan pelonggaran syarat TKDN kepada AS sebagai respons tarif impor sebesar 32%. TKDN yang menjadi syarat bagi pelaku industri asing dan domestik yang memasarkan produknya di Tanah Air.

Namun, pelaku usaha mengkhawatirkan kebijakan itu justru akan menggaggu daya saing industri produk lokal.

Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan revisi aturan TKDN di industri otomotif oleh pemerintah Prabowo dapat membuka peluang strategis untuk meningkatkan investasi asing dan daya saing global. Meski demikian, ada juga ancaman di baliknya.

"Revisi TKDN harus diimbangi dengan langkah taktis agar Indonesia tidak terjebak ketergantungan impor, bahkan mematikan industri komponen tier 1 hingga tier 3 yang ada, sehingga berdampak PHK," ujar Yannes kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

ika tidak dibangun regulasi yang memastikan industri lokal terlindungi, ratusan perusahaan lokal tier-1 dan tier-2 yang memproduksi komponen otomotif bisa kehilangan pasar, terutama jika mereka tidak mampu bersaing dalam hal harga atau kualitas.

BACA JUGA

[Dukung Industri Nasional, Daikin Kantongi Sertifikat TKDN](#)

[Kadin AS Tunggu Realisasi Prabowo Hapus Kuota Impor dan Relaksasi TKDN](#)

[Industri Mesin Minta Pemerintah Tak Gegabah Longgarkan TKDN & Impor](#)

"Lalu, industri komponen lokal yang menyerap banyak tenaga kerja, sulit bersaing dengan komponen impor karena kelonggaran TKDN, industri lokal ini bisa kehilangan pasar, sehingga ujungnya berpotensi mengurangi produksi, PHK, hingga penutupan pabriknya," pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki menyoroti potensi banjirnya produk komponen otomotif dari China ke pasar Indonesia akibat kebijakan dagang Amerika terhadap China.

"Produk-produk murah dari China, terutama untuk kebutuhan aftermarket, dikhawatirkan akan melemahkan daya saing produk lokal," ujar Rachmat.

Ketua Umum Gabungan Industri Pengrajan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin meminta pemerintah untuk mengatur rencana pelonggaran TKDN dengan tepat agar tidak berbalik melemahkan industri lokal.

Namun dia tidak menampik urgensi TKDN sebagai pendorong masuknya investasi dalam negeri sehingga kebutuhan barang modal dapat dipenuhi oleh produsen lokal.

Di sisi lain, kebijakan perdagangan AS yang baru juga bisa memengaruhi kinerja ekspor produk permensinan RI. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekspor mesin

Langkah Cermat Lobi Pelonggaran TKDN Hindari Industri Lokal Jadi Korban Tarif Trump
ekspor RI produk permesinan berupa spare part dan barang-barang hasil pengeluaran, produk otomotif akan terdampak karena akan memiliki penurunan daya saing di pasar AS," ujarnya.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan perlindungan industri dalam negeri tetap menjadi prioritas pemerintah di tengah rencana relaksasi TKDN. Saat ini rencana penyesuaian TKDN masih dalam pembahasan yang akan langsung di bawah pengarahan Presiden Prabowo.

Faisol menyebut bahwa pemerintah akan menyesuaikan TKDN, khususnya untuk permintaan information and communication technologies (ICT).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistik.

"Sesuai dengan arahan Presiden, sekarang kami sedang merumuskan langkah-langkah penyusunan kebijakan yang sesuai arahan Presiden terkait TKDN," tuturnya.



INDUSTRI ELEKTRONIK MINTA DIKECUALIKAN

Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman mengatakan pemerintah semestinya mengecualikan produk elektronik dalam rencana pelonggaran TKDN.

Pasalnya, penerapan TKDN sektoral elektronik penting untuk meningkatkan utilisasi industri elektronik, serta untuk jaminan dan menarik investasi. Utilisasi industri terutama produk lokal yang sudah memenuhi TKDN terancam turun jika relaksasi diterapkan.

"Sebaiknya penerapan TKDN untuk elektronik diperluas dengan TKDN sektoral di mana setiap peralatan elektronik selain HKT [handphone, komputer genggam, dan tablet] punya kebijakan tersendiri," katanya saat diwawancara Bisnis pada Rabu.

Langkah Cermat Lobi Pelonggaran TKDN Hindari Industri Lokal Jadi Korban Tarif Trump

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat 19 kelompok barang yang diwajibkan syarat TKDN dengan persentase yang bervariasi, di antaranya alat pertanian, peralatan migas, bahan konstruksi, peralatan elektronika, hingga telekomunikasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di **Google News** dan **WA Channel**

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa & Rizqi Rajendra

Editor : Nindya Aldila



Share

BISNIS INDONESIA PREMIUM TERBARU

Bisnis 2 jam yang lalu

Langkah Cermat Lobi Pelonggaran TKDN Hindari Industri Lokal Jadi Korban Tarif Trump



Emiten 2 jam yang lalu

Jejak JPMorgan dan Blackrock di Emiten Pengangkat IHSG (BMRI, BBRI, hingga BBCA)



Emiten 4 jam yang lalu

Barisan Saham Pilihan Konglomerat Indonesia Kuartal II/2025



English Version 5 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Eyes Two Promising Stock Sectors After Eid 2025



Rintisan 12 jam yang lalu

Memperluas Ruang Gerak Bisnis Insurtech di Tengah Dominasi Fintech Lending



Berita Premium Lainnya

Langkah Cermat Lobi Pelonggaran TKDN Hindari Industri Lokal Jadi Korban Tarif Trump

Connect With Us

BISNISINDONESIA.ID	BISNIS INDONESIA	BANTEN	KEBUMEN/KLATEN	KENDARI
HypeAbis.id	Bisnis Indonesia Premium	Semarang	Sulawesi	Privasi
Context.id	Bisnis Plus	Bali	Papua	Kode Etik
DataIndonesia.id	Bisnis TV	Bali	Papua	Karir
Espos.id	BroadCash			
HarianJogja.com				